

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Seiring dengan adanya perubahan kepemimpinan nasional dari orde baru menuju era reformasi, pola hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga ikut berubah. Pada awalnya pemerintahan bersifat sentralistik yang ternyata menimbulkan banyak ketidakadilan di berbagai daerah di Indonesia, dan pada akhirnya tanggal 1 Januari 2001 pemerintahan sentralistik diubah menjadi desentralisasi atau lebih dikenal sebagai otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Era reformasi memberikan perubahan paradigma secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemudian dalam perkembangannya undang-undang ini telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian masih diperbaharui lagi karena sudah tidak sesuai dan menjadi Undang-undang No.23 tahun 2014 serta Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat Dengan Daerah. Dengan ada dan diberlakukannya Undang-undang ini maka memberikan peluang bagi setiap daerah untuk menggali potensi-potensi lokal yang ada didaerahnya dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah memberikan sebuah harapan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan kemandirian daerah. Dalam kaitannya dengan desentralisasi dalam pengelolaann keuangan daerah, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan daerah.

Kemandirian keuangan suatu daerah bisa dilihat dari seberapa besar kontribusi Pendapata Asli daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator atau kriteria

yang digunakan untuk mengukur seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan maka semakin kecil pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat .

Harapan besar Pemerintah Daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ketahun dirasakan oleh beberapa daerah otonom jauh dari harapan, malah yang terjadi adalah wujud ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat yang merupakan cerminan atas ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Belanja Daerah sendiri.

Pemerintah daerah setidaknya harus mampu mandiri dalam membiayai seluruh kebutuhan daerahnya tanpa harus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi setiap daerah memiliki kemampuan dan keterbatasan dalam mengolah dan tersedianya sumber daya alam serta manusia. Dengan adanya keterbatasan ini menyebabkan perbedaan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan di setiap daerah yang menjalankan otonomi, maka oleh sebab itu campur tangan pemerintah pusat masih sangat diperlukan untuk memperkecil perbedaan. Permasalahan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang dialami di daerah bagaimana daerah mampu menggali, mendapatkan dan memanfaatkan sumber ekonomi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah..

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia masalah utama yang dihadapi daerah otonom adalah rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara di sisi lain potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia cukup melimpah dan potensial untuk dikembangkan begitu juga dengan Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu yang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti halnya Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu merupakan daerah yang bertetangga tetapi ketiga daerah tersebut mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbeda cukup jauh dan juga perbedaan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lumayan jauh. Hal ini menjadi salah satu daya tarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu mengukur tingkat kemandirian berdasarkan derajat desentralisasi fiskal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar perbandingan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu meliputi kemandirian daerah yang dilihat berdasarkan desentralisasi fiskal pada tahun anggaran 2010-2016. Variabel yang diteliti yaitu menggunakan laporan keuangan daerah Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu yang berasal dari instansi pemerintahan yaitu Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPB).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar perbandingan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah atau instansi terkait, sebagai tambahan informasi dan tolak ukur bagi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai tambahan wawasan dan bahan referensi penelitian mengenai analisis tingkat kemandirian keuangan daerah.